



► PRODUK LEGISLASI

Tak Ada Sekolah Tolak Siswa Difabel

UMBULHARJO—Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Jogja menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pendidikan Inklusi.

Ujang Hasanudin
hasanudin@harianjogja.com

Raperda tersebut sebagai payung hukum mengatasi persoalan aksesibilitas pendidikan untuk disabilitas. Dengan adanya perda tersebut nantinya tidak ada lagi istilah sekolah menolak siswa difabel.

"Raperda ini lebih spesifik mengatasi soal pendidikannya," kata Ketua Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Jogja, Agung Damar Kusumandaru, Jumat (19/5).

Agung mengatakan raperda inisiatif komisinya tersebut saat ini harus selesai pada tahap penyusunan naskah akademik (NA). Naskah tersebut segera

► Naskah tersebut segera dibahas dalam rapat panitia khusus.

► Akses sekolah bagi difabel masih menjadi persoalan.

dibahas dalam rapat panitia khusus (Panisus). Ia berharap raperda tersebut selesai tahun ini atau bersamaan dengan Raperda tentang Pemenuhan dan Perlindungan Hak Penyandang Disabilitas.

Menurutnya, raperda tersebut bisa menekan Pemerintah Kota Jogja menyediakan aksesibilitas pendidikan disabilitas sampai ketersediaan guru pendamping. Meski Kota Jogja merupakan kota inklusi, kata dia, namun belum semua sekolah di Jogja bisa diakses oleh penyandang disabilitas.

"Misalnya di SD Giwangan itu banyak siswa difabelnya tapi guru pendampingnya kurang," kata Agung. Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) ini memastikan dengan adanya perda nantinya tidak ada lagi istilah sekolah menolak siswa difabel.

Ketua Bidang Kajian, Forum Penguatan

Hak-Hak Penyandang Disabilitas, Armi Surwanti mengatakan lembaganya belum mengetahui adanya pembahasan Raperda tentang Pendidikan Inklusi di Kota Jogja. Sejauh ini pihaknya baru mendorong penyelesaian Raperda Pemenuhan dan Perlindungan Hak Penyandang Disabilitas, yang masih dibahas Dewan Kota Jogja.

"Kalau semangatnya memperjuangkan hak-hak penyandang disabilitas kami akan mendukung dan memberi masukan," kata Armi.

Ia mengakui akses sekolah bagi difabel masih menjadi persoalan, khususnya soal kurangnya guru pendamping. Sejauh ini guru pendamping untuk siswa difabel, kata dia, sekolah selalu meminjam dari Sekolah Luar Biasa (SLB). Ia berharap Pemerintah Kota bisa merekrut sendiri guru pendamping disabilitas.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pendidikan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 18 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005